

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Gapoktan Subur Makmur

Kelompok tani di Desa Tunjungrejo sebenarnya bukanlah lembaga baru karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan dari lembaga semacam kelompok tani ini adalah sebuah keniscayaan dan keharusan. Gabungan kelompok tani dibentuk dengan nama Margo Semi yang selanjutnya di sebut “Gapoktan Margo Semi”. Gapoktan Margo Semi mulai di dirikan pada tahun 2001 di Desa Tunjungrejo oleh semua anggota petani dengan tujuan untuk mengikat poktan-poktan yang ada di Desa Tunjungrejo, di prakarsai oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Bupati Pati. Para perintis dalam Gapoktan tersebut adalah :

- a. Bapak Sudarmo sebagai ketua.
- b. Bapak Haryoso sebagai sekretaris.
- c. Bapak Sumin sebagai sekretaris.

Para perintis Gapoktan Margo Semi merasa bahwa bentuk gabungan kelompok tani ini adalah bentuk kelompok yang paling tepat karena hal ini mengutamakan pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan anggota. Dibentuknya Gapoktan ini dengan maksud bahwa petani modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan, yaitu dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian dikelurahan melalui pertanian. Gapoktan tersebut akan dibina dan dikawal hingga menjadi lembaga usaha yang mandiri, profesional dan memiliki jaringan kerja luas. Sedangkan dasar dari pengorganisasian ini adalah musyawarah mufakat khususnya untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat tani pada umumnya.

Pada saat itu Gapoktan Margo Semi dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok tani yaitu disebelah utara Poktan Bumi Respati, sebelah tengah Poktan Sri Panggung dan disebelah selatan Poktan margo Semi.

Pada tahun 2006 terjadi perombakan kepengurusan Gapoktan, dimana nama Gapoktan di ganti dengan nama “Gapoktan SUBUR MAKMUR”. Selain itu kepengurusan Gapoktan pun digantikan oleh Bapak Munawar, beliau menjabat sebagai ketua di Gapoktan SUBUR MAKMUR dan dibantu oleh rekan-rekannya yaitu Bapak M. Zubaidi beliau menjabat sebagai sekretaris dan Bapak Hambali sebagai bendahara.

Mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih terdapat perluasan didalam poktan, dimana Poktan Sri Panggung dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Poktan Sri Panggung dan Poktan Subur Makmur 1, dan ditambah lagi 2 (dua) kelompok poktan yaitu Poktan Cempaka Putih dan Poktan Mawar Merah. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang dimiliki terlalu luas sehingga perlu adanya pemecahan kelompok.¹

Fungsi pokok dibentuknya Gapoktan ini adalah :²

- a. Mendorong berkembangnya kelompok tani sebagai wadah kerja sama, kelompok belajar dan unit produksi.
- b. Mendorong berkembangnya usaha bersama para petani dalam bentuk koperasi tani atau lembaga keuangan mikro di Desa Tunjungrejo.
- c. Mendorong terciptanya aneka ragam agribisnis pedesaan yang berorientasi pasar dan permintaan.
- d. Menggali dan mengelola aset kekayaan Gapoktan.
- e. Menjembatani anggota kelompok tani yang ada dalam naungannya dengan pemerintah desa dan pihak luar.

¹Hasil wawancara dengan Bapak Munawar selaku Ketua Gapoktan Subur Makmur, Pada Tanggal 14/08/2016 jam 18.30.

²Hasil Dokumentasi Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Pada Tanggal 14/08/2016.

- f. Menerima serta mengelola bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah dan pihak lain yang tidak terikat.

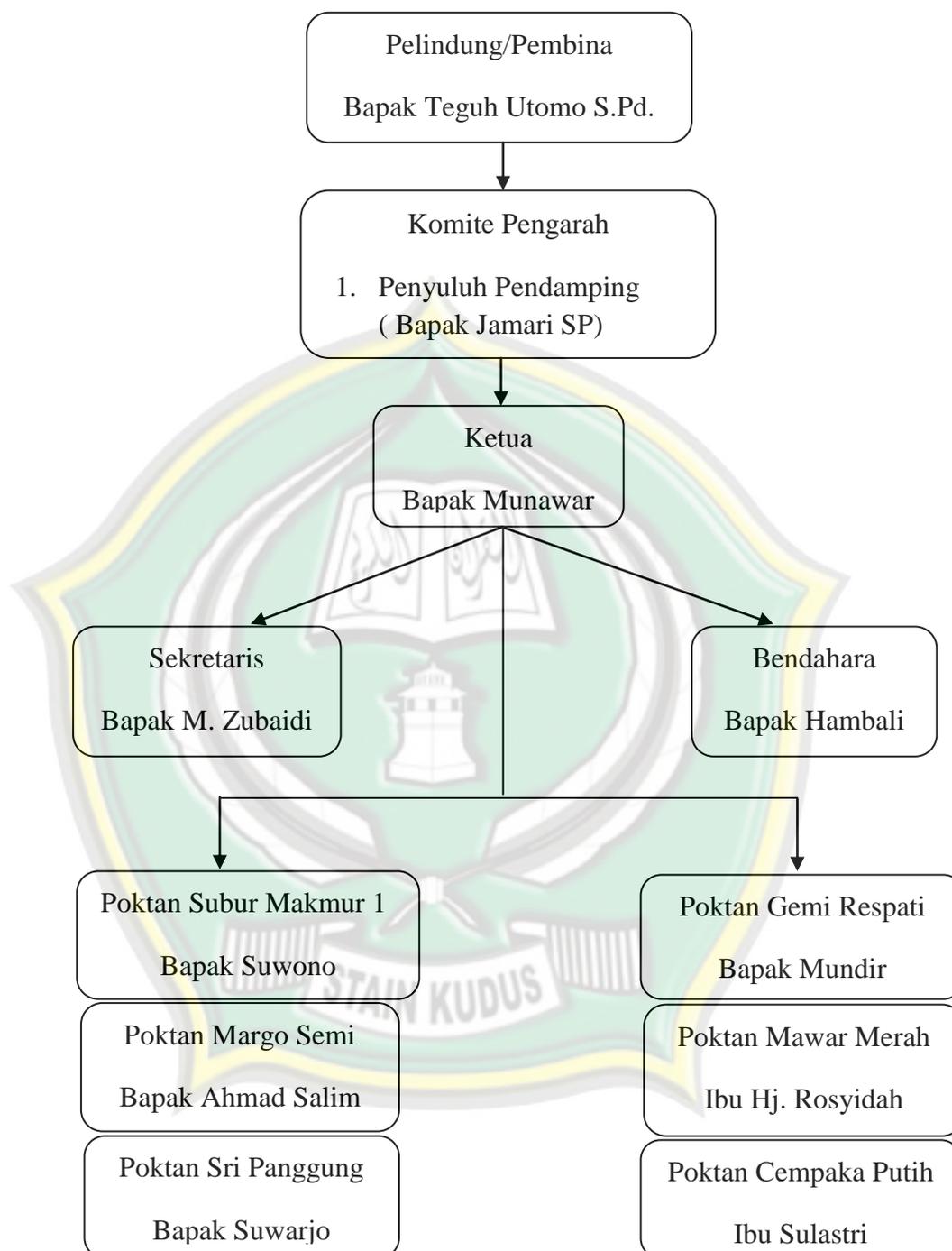
2. Letak Geografi Gapoktan Subur Makmur

Gapoktan Subur Makmur berkantor di Jl. Juana-Tayu Kilo Meter 17 Desa Tunjungrejo. Desa Tunjungrejo adalah desa yang berada di bagian timur Kecamatan Margoyoso, antara Desa Tunjungrejo dengan pusat pemerintahan Kecamatan berjarak sekitar 2 Kilo Meter, Desa Tunjungrejo memiliki luas wilayah sebesar 289.053 Ha, dengan batas wilayah disebelah utara Desa Margoyoso, sebelah selatan Desa Cebolek Kidul, sebelah barat Desa Watoroyo dan di sebelah Timur Laut Jawa.³



³ Hasil Dokumentasi Data Monografi Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Pada Tanggal 14/08/2016.

3. Struktur Organisasi Gapoktan Subur Makmur



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Gapoktan Subur Makmur

- Pelindung : Teguh Utomo, S.Pd.
Komite Pengarah : Jamari, SP
Ketua Umum : Munawar
Sekretaris : M. Zubaidi
Bendahara : Hambali, S.Pd.I
Sie. Pembantu : 1. Bapak Suwono (Poktan Subur Makmur 1)
2. Bapak Ahmad Salim (Poktan Margo
Semi)
3. Bapak Suwarjo (Poktan Sri Panggung)
4. Bapak Mundir (Poktan Gemi Respati)
5. Ibu Hj. Rosyidah (Poktan Mawar Merah)
6. Ibu Sulastri (Poktan Cempaka Putih)⁴

4. Kondisi Perekonomian

Desa Tunjungrejo merupakan desa yang memiliki potensi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan, mayoritas masyarakat di Desa Tunjungrejo mengandalkan lahan pertanian dan perikanan sebagai penunjang perekonomian mereka.

a. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Tunjungrejo mengandalkan perekonomiannya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Hal tersebut ditunjukkan pada tahun 2015 bahwa masyarakat di Desa Tunjungrejo lebih mengandalkan perekonomiannya dibidang pertanian dan perikanan. Dimana luas wilayah yang dimiliki untuk pertanian 86 Ha dengan hasil panen kurang lebih 602 ton per tahun, dan untuk perikanan 170 Ha dengan hasil panen kurang lebih 612,5 ton per tahunnya. Dalam bidang peternakan Desa Tunjungrejo memilikipeternakan ayam kampung sebanyak 1500

⁴ Hasil Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati , Dikutip Tanggal 15/08/2016

ekor, itik 4800 ekor, kambing 118 ekor, dan sapi biasa sebanyak 27 ekor.⁵

5. Kondisi Sosial Budaya

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tunjungrejo pada tahun 2015 tercatat 1027 jiwa yang terdiri dari 1619 penduduk laki-laki dan 1728 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	119	121	240
2	5 – 9	127	132	259
3	10 – 14	133	144	277
4	15 – 24	170	185	355
5	25 – 34	173	187	360
6	35 – 44	225	235	450
7	45 – 54	198	212	410
8	55 – 64	186	193	379
9	65+	289	319	607
Jumlah		1.619	1.728	3.347

b. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2015, penduduk Desa Tunjungrejo rata-rata menempuh pendidikan hingga ke jenjang SD sebanyak 977 jiwa. Adapun jumlah rinciannya sebagai berikut :

Table 4.2 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	440 orang
2	Tidak Tamat SD	310 orang
3	SD – SLTP	1392 orang

⁵ Hasil Dokumentasi Data Monografi Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016

4	SLTA	880 orang
5	Akademi/PT	310 orang
6	Buta Huruf	14 orang

c. Agama

Sebagian besar penduduk Desa Tunjungrejo menganut agama Islam sebesar 3335 jiwa, diikuti oleh agama Kristen 2 jiwa dan Katolik sebanyak 10 jiwa. Sedangkan untuk tempat peribadatan di Desa Tunjungrejo pada tahun 2015, untuk masjid sebanyak 1 buah, dan surau sebanyak 10 buah.⁶

6. Visi dan Misi

a. Visi

Menggali potensi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan hayati.

b. Misi

Menggabungkan modal dan potensi yang dikuasai untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.⁷

7. Tujuan

Adapun tujuan dibentuknya Gapoktan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bergotong royong dikalangan anggota secara kooperatif, membangun permodalan dan pengembangan usaha.
- b. Memberdayakan sumberdaya manusia (SDM) dikalangan anggota beserta keluarga dibidang agribisnis.
- c. Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai untuk kesejahteraan bersama dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

⁶ Hasil Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

⁷ Hasil Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

- d. Membangun kegiatan ekonomi yang bermuara pada Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis pada kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.
- e. Menjembatani kepentingan anggota dengan pihak pemerintah atau pihak luar.⁸

8. Anggota, Hak dan Kewajiban Anggota

a. Anggota

- 1) Anggota Gapoktan SUBUR MAKMUR terdiri dari anggota kelompok tani (Poktan) yang berkedudukan di Desa Tunjungrejo.
- 2) Kelompok tani yang dimaksud diatas adalah kelompok tani hamparan, kelompok tani domisili dan atau kelompok tani fungsional yang beranggotakan petani/peternak/pekebun/pelaku agribisnis Desa Tunjungrejo.

b. Hak Anggota

- 1) Setiap anggota mempunyai hak suara dalam menentukan keputusan rapat.
- 2) Setiap anggota berhak bicara menyampaikan usul, pendapat dan gagasan di dalam maupun diluar rapat.
- 3) Setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus dan atau kelengkapan perangkat organisasi.
- 4) Setiap anggota mempunyai hak untuk mendapat pinjaman modal dari Gapoktan, sesuai dengan aturan dalam AD/ART.
- 5) Setiap anggota berhak memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gapoktan Subur Makmur.

c. Kewajiban Anggota

- 1) Setiap anggota wajib membantu pengurus melakukan tugas organisasi.

⁸ Hasil Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

- 2) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik Gapoktan Subur Makmur.
- 3) Setiap anggota berkewajiban memahami AD/ART yang sah dan mematuhi AD/ART yang disahkan dalam rapat pleno anggota.
- 4) Tata cara penerimaan menjadi anggota dan atau penghentian menjadi anggota Gapoktan SUBUR MAKMUR diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Setiap anggota berkewajiban membayar uang simpanan wajib dan simpanan pokok yang jumlah serta tata caranya diatur tersendiri didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan dalam rapat anggota, yaitu uang simpanan wajib Rp. 5.000/bulan dan uang simpanan pokok Rp. 50.000,- sesuai hasil rapat anggota.⁹

9. Peran dan Tugas Gapoktan Subur Makmur

Adapun program kerja Gapoktan Subur Makmur adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinis kegiatan yang berkaitan dengan BLM-PUAP.
- b. Menyalurkan dana bantuan modal usaha sesuai dengan usulan anggota (RUA) yang dikompilasi melalui Rencana Usaha Bersama (RUB).
- c. Melaporkan perkembangan usaha anggota setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pencairan dana dan mempertanggung jawabkan secara penuh atas keuangan yang diterima, dan penyalurannya kepada anggota.

⁹ Hasil Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

- e. Melaporkan setiap perkembangan dari dana bantuan langsung masyarakat yang telah dicairkan ke Gapoktan kepada petani anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Berkewajiban melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha yang dicairkan.¹⁰

10. Permodalan Gapoktan Subur Makmur

Modal Gapoktan Subur Makmur diperoleh dari :

- a. Simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- berasal dari anggota yang disetorkan setiap bulannya.
- b. Simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- berasal dari anggota.
- c. Bantuan dari pemerintah berupa uang hibah sebesar 100 juta dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

Sedangkan untuk penggunaannya, modal yang terkumpul dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha Gapoktan Subur Makmur, Peneliti SDA, Pelatihan SDM dan biaya operasional pengurus.¹¹

11. Unit Usaha Gapoktan Subur Makmur

Unit usaha yang dikembangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Gapoktan Subur Makmur adalah usaha dibidang pertanian yang di bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Budidaya *on-farm*, yang didalamnya terdiri daari budidaya tanaman padi, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
- b. Non Budidaya *off-farm*, yang didalamnya terdiri dari industri rumah tangga pertanian dan pemasaran hasil pertanian mikro (bakulan).

Prosedur pelaksanaannya menggunakan sistem simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar menjadi anggota

¹⁰ Hasil Dokumentasi RUA,RUB, dan RUK Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

¹¹ Hasi Dokumentasi AD/ART Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

simpan pinjam. Pinjaman tersebut dikhususkan untuk membiayai usaha yang bergerak dibidang pertanian dan pengelolaan hasil pertanian. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan di Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo adalah sebagai berikut:

a. Akad Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan perniagaan dimana Gapoktan sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) dari kedua belah pihak, dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian anggota.

b. Akad Murabahah

Piutang/pembiayaan murabahah adalah tagihan dari akad jual-beli antara Gapoktan dengan anggota atas transaksi jual-beli, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.¹² Adapun jumlah anggota yang terdaftar di anggota simpan pinjam Gapoktan Subur Makmur adalah sebagai berikut :

Table 4.3
Data Jumlah Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Tani Margo Semi

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Suwarto	Pertanian	2.000.000
2	Rohmad	Pertanian	2.000.000
3	Ahmad Salem	Pertanian	3.000.000
4	Ahmad Solekhan	Pertanian	1.000.000
5	Sukarsi	Pertanian	1.000.000
6	Sukamto	Pertanian	1.000.000
7	Siti Saudah	Pertanian	1.500.000
8	Puni	Pertanian	5.000.000

¹² Hasil Dokumentasi RUA,RUB, dan RUK Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Dikutip Tanggal 15/08/2016.

9	Sukoyo	Pertanian	5.000.000
10	Mursidi	Pertanian	3.000.000
11	Suprapti B. Darsono	Pertanian	3.000.000
12	Suwito	Pertanian	1.500.000
13	Niman	Pertanian	5.000.000
14	Sunardi	Pertanian	1.000.000
15	Teguh Utomo	Pertanian	5.000.000

Table 4.4**Data Jumlah Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Tani Sri Panggung**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Muadz	Pertanian	2.000.000
2	Sakdun	Pertanian	3.000.000
3	Suwarjo	Pertanian	
4	Sumarno	Pertanian	1.000.000
5	Sukarjan	Pertanian	1.000.000
6	Ashadi Suwarti	Pertanian	6.000.000

Table 4.5**Data Jumlah Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Tani Mawar Merah**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Isroiyatin Ulya	Pertanian	5.000.000
2	Sofiana Nur M.	Pertanian	3.000.000
3	To'ati	Pertanian	
4	Supri	Pertanian	

Table 4.6**Data Jumlah Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Tani Subur Makmur 1**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Hj. Rosyidah	Pertanian	3.000.000
2	M. Zubaidi	Pertanian	1.500.000
3	Siti Aminah	Pertanian	3.000.000
4	Marzuki	Pertanian	2.000.000
5	Jauhari	Pertanian	2.000.000
6	Khoirun Ni'am	Pertanian	1.000.000

Table 4.7

Data Jumlah Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Tani Gemi Respati

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Munawar	Pertanian	1.500.000
2	Hambali	Pertanian	
3	Sujono	Pertanian	3.000.000
4	Sudadi	Pertanian	2.000.000
5	Mualim	Pertanian	
6	Mundir	Pertanian	2.500.000
7	Irfan	Pertanian	2.000.000
8	Ali Muji	Pertanian	1.000.000
9	Sukiswanto	Pertanian	2.500.000
10	Darto	Pertanian	3.000.000
11	Sakamin	Pertanian	
12	Harsoyo	Pertanian	2.000.000
13	Supardi	Pertanian	2.000.000
14	Giman	Pertanian	4.000.000

B. Deskripsi Data**1. Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamari, SP, selaku Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) secara terus menerus, yaitu satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim.¹³

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawar selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur sekaligus pengurus pelaksanaan program PUAP diketahui bahwa:

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP. Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

Ya...adanya kegiatan yang menunjang dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada masyarakat muslim.¹⁴

Sedangkan Bapak Salim selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Subur Makmur mengatakan bahwa:

Saya mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilakukan satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.¹⁵

Sementara dari Bapak Darto menambahkan bahwa:

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) secara terus menerus, yaitu satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim.¹⁶

Berikutnya, Ibu Siti Aminah juga mengatakan:

Saya mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilakukan satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.¹⁷

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Salim Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Darto Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

2. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tidak Mengikuti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamari, SP, selaku Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terdapat kendala-kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program tersebut, Hampir semua penyuluh pendamping yang ada di Kecamatan Margoyoso memiliki masalah yang sama, sehingga program tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari kendala-kendala yang ada diantaranya adalah *pertama*, hampir semua pengurus program PUAP di Gapoktan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, *kedua*, karena kesibukan masing-masing anggota, walaupun tingkat pendidikannya memadai, tetapi karena tanggung jawabnya kepada keluarga lebih penting jadi program PUAP menjadi terabaikan, dan yang *ketiga*, hampir semua pengurus yang ada di Gapoktan Subur Makmur kurang begitu menguasai tentang pembukuan laporan keuangan. Selain itu adanya anggapan masyarakat mengenai bantuan dana hibah yang harus dibagi rata dan tidak perlu dikembangkan.¹⁸

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawar selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur sekaligus pengurus pelaksanaan program PUAP diketahui bahwa:

Terdapat kendala-kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program PUAP. Kendala-kendala tersebut adalah *pertama*, dari anggota yang melakukan pinjaman mengalami masalah dalam pelunasan pembiayaan atau bisa dibilang kredit macet, hal ini dikarenakan oleh faktor lingkungan seperti bencana alam dan kendala musim. *Kedua*, anggapan masyarakat mengenai bantuan dana hibah dari pemerintah yang menurut mereka harus dibagikan secara merata dan tidak perlu untuk dikembangkan. Dan *ketiga*, permasalahan yang dihadapi pengurus itu sendiri, dimana anggota yang menjadi pengurus rata-rata pekerjaannya petani dan mereka tidak memiliki pengalaman dibidang akutansi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP. Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

keuangan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pembukuan laporan keuangan.¹⁹

Sedangkan Bapak Salim selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Subur Makmur mengatakan bahwa:

Diketahui bahwa kendala-kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program PUAP adalah prosedur pengajuan pinjaman, dimana dalam pengajuan pinjaman terdapat syarat yang harus dipenuhi, *pertama*, sudah mendaftar sebagai anggota simpan pinjam, *kedua*, mengisi formulir pengajuan pinjaman, dan *ketiga*, menyerahkan surat berharga/sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Dari ketiga syarat tersebut ada salah satu syarat yang bagi sebagian orang termasuk Bapak Salim sendiri dirasa berat untuk dipenuhi, salah satu syarat tersebut adalah menyerahkan surat berharga/sertifikat sebagai jaminan, dalam hal ini tidak semua orang memiliki surat berharga/sertifikat yang bisa dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.²⁰

Sementara dari Bapak Darto menambahkan bahwa:

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PUAP adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman di Gapoktan, dari syarat-syarat yang ada terdapat salah satu syarat yang terasa sulit untuk dipenuhi, salah satu syarat tersebut adalah menyerahkan surat berharga/sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Seandainya ingin mengajukan pinjaman namun tidak ada surat berharga/sertifikat yang bisa dijadikan jaminan itulah yang dirasa berat oleh sebagian orang. Selain dari surat berharga/sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman terdapat kendala lain yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program PUAP, kendala tersebut adalah pembiayaan, selama melakukan pinjaman Bapak Darto belum bisa melunasi pinjaman yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan kegagalan pada masa panen.²¹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Salim Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Darto Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

Berikutnya, Ibu Siti Aminah juga mengatakan:

kendala-kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program PUAP adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri mengenai program tersebut. Mereka hanya memahami program tersebut secara global.²²

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) adalah hampir semua pengurus program PUAP di Gapoktan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Tujungrejo tentang program PUAP, karena kesibukan masing-masing anggota, walaupun tingkat pendidikannya memadai, tetapi karena tanggung jawabnya kepada keluarga lebih penting jadi program PUAP menjadi terabaikan dan hampir semua pengurus yang ada di Gapoktan Subur Makmur kurang begitu menguasai tentang pembukuan laporan keuangan. Dari pelaksanaan simpan pinjam pun terdapat pembiayaan bermasalah atau kredit macet sehingga menyebabkan program PUAP tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha.
- b. Pengetahuan yang dimiliki nasabah terbatas.²³

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

²³ Hasil Observasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat tidak Mengembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 14 Agustus 2016

3. Peran Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Agar Dapat Mengembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamari, SP, beliau mengatakan bahwa

upaya-upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dari pihak penyuluh pendamping sendiri hanya bisa memberikan saran-saran atau masukan yang nantinya dapat memotivasi masyarakat agar tergerak hati dan pikirannya dan mau sekaligus mampu dalam mengembangkan program PUAP. Selain itu dari pihak penyuluh juga melakukan pendekatan secara perlahan-lahan kepada masyarakat. Dengan adanya program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) ini diharapkan semua Gapoktan yang ada di Kecamatan Margoyoso khususnya di Desa Tunjungrejo mampu berubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A). Dimana dengan adanya LKM-A ini dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh petani mulai dari produksi, pengolahan hasil produksi hingga pemasaran hasil tanaman khususnya dibidang pertanian.²⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Munawar, beliau juga mengatakan bahwa:

Untuk masalah pembiayaan macet atau kredit macet dari pihak pengurus melakukan pendekatan pada nasabah yang kurang lancar dalam pelunasan pinjaman untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka mengalami masalah pada pembiayaan. Selanjutnya untuk menghadapi sikap masyarakat yang masih beranggapan bahwa bantuan dana PUAP adalah bantuan dana hibah yang harus dibagikan kepada masyarakat secara merata dan tidak perlu untuk dikembangkan, kami juga melakukan pendekatan pada mereka dengan mengadakan sosialisasi terkait program PUAP itu sendiri dan kegunaannya, selain itu kami juga memotivasi mereka agar mau dan mampu dalam mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Karena merubah watak, sikap dan pemikiran seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP, Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

ada kemauan dari masyarakat itu sendiri dan dorongan dari pihak lain agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.²⁵

Dari observasi yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa dari pihak penyuluh juga mengadakan sosialisasi sekaligus pelatihan kepada masyarakat khususnya petani di Desa Tunjungrejo mengenai bagaimana cara memproduksi tanaman padi yang bagus sehingga mampu memperoleh hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya.²⁶

C. Analisis Data

1. Analisis tentang Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamari, SP, selaku Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yaitu

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

²⁶ Hasil Observasi Upaya-Upaya yang Dilakukan Agar Masyarakat dapat Mengembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Tunjungrejo, Tanggal 22 Agustus 2016.

memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) secara terus menerus, yaitu satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim.²⁷

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawar selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur sekaligus pengurus pelaksanaan program PUAP diketahui bahwa:

Ya...adanya kegiatan yang menunjang dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kepada masyarakat muslim.²⁸

Sedangkan Bapak Salim selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Subur Makmur mengatakan bahwa:

Saya mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilakukan satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.²⁹

Sementara dari Bapak Darto menambahkan bahwa:

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yaitu memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) secara terus menerus, yaitu satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat muslim.³⁰

Berikutnya, Ibu Siti Aminah juga mengatakan:

Saya mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilakukan satu bulan sekali dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP. Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Salim Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Darto Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.³¹

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut lapisan-lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang kurang mampu yang dinilai tertindas oleh system dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari beberapa segi yaitu :

- a. Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.
- b. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dimiliki.

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.³²

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Selaku Anggota Simpan Pinjam di Gapoktan Subur Makmur, Tanggal 9 Agustus 2016.

³² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 20015, hlm. 188.

Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan Moh. Ali Aziz yang dikutip oleh Suhartini A Halim dalam bukunya dijelaskan bahwa pemberdayaan biasanya menggunakan strategi *bottom up*, artinya masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya.³³

Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan ssesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat*

³³ Suhartini A Halim dkk, *Op. Cit*, hlm. 134.

menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia.”³⁴

Konsep pemberdayaan masyarakat pun merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana konsep tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.³⁵

Menurut Kesi Widjajanti yang ditulis dalam jurnalnya tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.³⁶

Oleh sebab itu pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Hal tersebut diharapkan nantinya masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mampu meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ini, ada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam suatu program kegiatan di antaranya:

³⁴ Al-Qur'an Surat Al-Ra'd ayat 11, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm. 250.

³⁵ Andi Sopandi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Madani, Volume 1, nomor 2, Nopember 2009.

³⁶ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, nomor 1, Juni 2011, hlm. 16.

- a. Pada saat sosialisasi, masyarakat diharapkan ikut hadir, mendengarkan, menyimak, memahami, dan jika mampu menyampaikan ide atau gagasan yang dimiliki.
- b. Pada tahap perencanaan, masyarakat diharapkan ikut dalam memutuskan suatu usulan/gagasan program akan dilakukan.
- c. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat diharapkan mau ikut melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan bersama dengan suka rela dan gotong royong.
- d. Pada tahap pengendalian, masyarakat diharapkan ikut aktif mengawasi untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau meluruskan arah yang kurang tepat agar sesuai dengan tujuan kesepakatan semula.
- e. Pada tahap pelestarian, masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, memperbaiki jika terjadi kerusakan dan lainnya.
- f. Pada tahap pengembangan kegiatan, secara suka rela masyarakat diharapkan untuk tetap ikut serta menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan agar nilai manfaatnya tetap terjaga dan semakin luas.
- g. Pada tahap pasca kegiatan, masyarakat diharapkan merasakan hasilnya dan tetap menjaga nilai manfaat tersebut agar tetap bisa dinikmati generasi berikutnya.³⁷

2. Analisis tentang Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tidak Mengikuti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan

³⁷Hindun Faristin, "Pengelolaan Bisnis Islam Sektor Agribisnis dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Muslim", Skripsi, STAIN Kudus, 2008, hlm. 35.

untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.³⁸

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.³⁹

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa penyebab masyarakat tidak mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

³⁸ Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 59.

³⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 20015, hlm. 188.

a. Kurangnya pengetahuan dan potensi yang dimiliki

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua pengurus Gapoktan Subur Makmur di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati memiliki latar belakang mata pencaharian sebagai petani dan hampir semua pengurus yang ada kurang begitu menguasai dibidang akutansi keuangan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pelaporan keuangan Gapoktan Subur Makmur. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Jamari, SP, selaku Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian, beliau menjelaskan :

“Hampir semua pengurus program PUAP di Gapoktan rata-rata pekerjaannya petani. Dalam pengelolaan PUAP pun disini banyak administrasi yang harus dipenuhi, dari buku-bukunya sendiri mulai buku tamu, buku neraca, dan buku-buku yang lain tidak semua orang menguasainya termasuk pengurusnya sendiri”.⁴⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Munawar selaku Pengurus Gapoktan Subur Makmur, beliau mengatakan bahwa :

Dari pihak pelaksana pun karena rata-rata pengalamannya dibidang pertanian, kami pun kurang memahami tentang sistem kerja akutansi keuangan jadi kami memiliki kesulitan dalam pembukuan laporan keuangan. Maklum saja, kami merasa terkejut yang semula terbiasa bercocok tanam disawah tiba-tiba mendapat tanggung jawab mengelola administrasi keuangan.⁴¹

Sementara menurut teori dijelaskan faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal. Faktor internal merupakan penyumbang terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Dimana tingkat pengetahuan dari penguruslah menjadi pokok permasalahan. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP, Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan pengurus dalam merealisasikan pembiayaan.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemberdayaan yang lebih intensif agar masyarakat mampu dan mau dalam mengembangkan potensi dan lebih percaya diri dalam mengemban tanggung jawab yang telah diberikan. Untuk itu dari pihak Penyuluh Pendamping diharapkan lebih menanggapi permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

b. Kurangnya partisipasi masyarakat

Karena kesibukan masing-masing anggota, walaupun tingkat pendidikannya memadai, akan tetapi tanggung jawab kepada keluarga lebih penting sehingga program tersebut menjadi terabaikan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan adanya pembiayaan yang bermasalah, masyarakat berantusias dalam melakukan pinjaman namun pada waktu pelunasan pinjaman masyarakat lebih mementingkan kebutuhan pribadi dibanding membayar kewajibannya, hal ini juga didukung adanya anggapan bahwa dana yang disalurkan adalah bantuan dana hibah yang harus dibagi rata dan tidak perlu dikembangkan. Dampaknya pihak pengurus pun tidak bisa melakukan RAT, hal ini akan mempengaruhi pemberian gaji kepada pengurus, karena apabila RAT tidak dilakukan maka SHU pun tidak bisa dikeluarkan. Hal inilah yang menjadi penyebab para anggota lebih mementingkan tanggung jawabnya kepada keluarga dibanding

⁴² Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, PAM Press, Banten, 2012, hlm. 212.

mengelola program tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut bapak Jamari, SP, selaku Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian, beliau mengatakan bahwa :

Namanya orang pasti memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Karena kesibukan masing-masing, walaupun tingkat pendidikannya memadai, tapi karena tanggung jawab kepada keluarga lebih penting jadi program tersebut menjadi terabaikan.⁴³

Kemudian Bapak Munawar juga menambahkan bahwa :

Saya rasa untuk menjadi pengurus di Gapoktan Subur Makmur tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, pada kenyataannya tidak semua orang mau menjadi pengurus di Gapoktan, karena sistem kerja sebagai pengurus Gapoktan itu suka relawan, tidak menerima upah ataupun gaji. Mereka harus mampu menyempatkan waktu mereka, menyempatkan tenaga dan pikiran mereka untuk mengembangkan program-program yang ada di Gapoktan, salah satunya program PUAP. Tiak ada syaratnya saja tidak ada yang mau, apalagi ada syaratnya, malah tambah tidak mau.⁴⁴

Sementara menurut pendapat Moh. Ali Aziz yang dikutip oleh Suhartini A Halim dalam bukunya dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamari, SP, Selaku Penyuluh Pendamping Program PUAP dari Dinas Pertanian, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu sendirilah yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai kurangnya partisipasi masyarakat terkait adanya program PUAP belum sesuai dengan teori yang ada. kenyataannya partisipasi masyarakat di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terkait adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) masih minim sekali. Inilah yang menjadi penyakit dalam sebuah organisasi, dimana tidak ada rasa peduli dan rasa tanggung jawab untuk mengemban tugas. Padahal di dalam sebuah organisasi yang sukses dibutuhkan adanya profesionalisme semua anggota, adanya rasa tanggung jawab yang besar, rasa percaya diri yang tinggi dan keyakinan bahwa apabila ada kemauan pasti ada jalan untuk menuju kesuksesan. Islam pun menjelaskan bahwa perubahan adalah suatu keharusan dan keniscayaan untuk menuju kearah yang lebih baik, dan perubahan itu akan terwujud apabila ada niatan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan. Kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas, sistem ini merupakan sistem yang khas dari agama Islam.⁴⁶

Untuk itu dari pihak Penyuluh Pendamping diharapkan lebih agresif dalam mendampingi, mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk merubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Dari pihak Pengurus pun harus memiliki rasa keinginan dan kemauan serta usaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

⁴⁵ Suhartini A Halim dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005., hlm. 8.

⁴⁶ Didin Hafidhuddin dan Handri Tanjung, *Manajemen Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 71.

c. Pemikiran masyarakat yang masih kuno

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) adalah pemikiran mereka yang masih kuno, masyarakat beranggapan bahwa bantuan Pemerintah yang berupa dana hibah tersebut harus dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat khususnya petani dan tidak perlu untuk dikembangkan.

Sedangkan menurut Richard Carver, *managing direktor Coverdale Organizational*, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal itu menuntut diciptakannya suatu budaya yang mendorong orang-orang di semua tingkat untuk merasa mereka bisa menghasilkan perubahan dan membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri dan keterampilan-keterampilan untuk menghasilkan perubahan-perubahan itu.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan yang telah dipaparkan dengan teori yang ada berbanding terbalik. Seharusnya dengan adanya bantuan Pemerintah berupa program simpan pinjam dari PUAP ini, masyarakat diharapkan lebih antusias dalam mengembangkannya. Dimana program tersebut dirasa dapat memberikan manfaat yang sangat bagus untuk masyarakat itu sendiri, khususnya petani. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Teguh Utomo, S.Pd, selaku Kepala Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati beliau pun mengatakan bahwa semua

⁴⁷David Clutterbuck dan Susan Kornaghan, *The Power of Empowerment (Release the Hidden Talents of your Employees)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2010, hlm. 3.

program yang ada di Desa Tunjungrejo sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya program PUAP untuk petani. Dimana program yang bergerak dibidang simpan pinjam ini dapat membantu para petani dalam masalah pengelolaan pertanian yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

d. Pembiayaan yang bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diketahui bahwa penyebab masyarakat tidak mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan salah satunya adalah kredit macet. Dimana anggota mengalami masalah dalam pelunasan pinjaman. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah faktor lingkungan yaitu bencana alam dan kendala musim.

Sedangkan menurut teori dalam pembiayaan bermasalah mempunyai beberapa penyebab, diantaranya :⁴⁸

a) Faktor internal

Faktor internal merupakan penyumbang terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan pengurus dalam merealisasikan pembiayaan.

b) Faktor eksternal

Dalam melakukan pembiayaan, ada 4 yang harus diperhatikan. Diantaranya :

⁴⁸ Nur S. Buchori, *Loc.Cit*, hlm. 212.

- karakteristik calon penerima pembiayaan, aspek analisis yang sulit dalam pembiayaan adalah menilai karakter seseorang. Penilaian karakter bisa dilakukan jika kita sudah mengenal calon pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.
 - penggunaan dana oleh penerima pembiayaan, terkadang calon penerima pembiayaan menggunakan dana yang telah dipinjam untuk keperluan lain diluar perjanjian yang telah dilakukan dengan petugas pembiayaan.
 - Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, penerima pembiayaan kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidup mereka, dibandingkan harus membayar kewajibannya.
 - Memprioritaskan kepentingan lain, keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Lembaga Keuangan Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain, misalnya ada peluang bisnis baru yang sedang dirintis anggota, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran dipergunakan untuk mengembangkan bisnis baru tersebut.
- c) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan diantaranya bencana alam, kebijakan pemerintah, huru-hara dan kendala musim.

Dalam permasalahan yang ada terdapat teori yang menyatakan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal dan faktor lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara permasalahan yang ada dengan teori sudah sesuai, dimana masyarakat tani di Desa Tunjungrejo tidak dapat melunasi pinjaman dikarenakan kegagalan panen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh

terhadap kendala yang dialami oleh anggota simpan pinjam di Gapoktan.

Walaupun demikian pinjaman tetaplah pinjaman. Dalam Islam pinjaman tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.⁴⁹ Namun dalam pengambilan manfaatnya harus dengan etika yang ada yaitu dengan tidak merusak bendanya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tidak rusak bendanya.

Untuk itu seburuk apapun kondisi yang sedang dialami oleh peminjam, ketika ia mampu untuk melunasi pinjamannya maka hendaklah segera membayar. Jadilah orang yang amanah, karena sifat amanah sangat penting untuk dimiliki, apabila seseorang tidak memiliki sifat amanah maka kepercayaan seseorang sangat sulit didapat.

Ha ini seperti tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Anfaal Ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakannya kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.⁵⁰

e. Persyaratan pinjaman yang memberatkan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat tidak mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan adalah persyaratan dalam pengajuan pinjaman. Persyaratan untuk pengajuan pinjaman di Gapoktan Subur Maknur Desa Tunjungrejo diantaranya sudah terdaftar menjadi anggota simpan pinjam, mengisi formulir pengajuan pinjaman,

⁴⁹ Murtada Mutahari, *Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayat, Bandung, 1995, hlm. 67.

⁵⁰ Al-Qur'an Surat Al-Anfaal ayat 27, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm. 180.

menyerahkan surat berharga atau sertifikat sebagai jaminan. Dari ketiga syarat ini terdapat syarat yang menurut sebagian orang dirasa berat untuk dipenuhi, syarat tersebut adalah penyerahan surat berharga atau sertifikat sebagai jaminan, karena tidak semua orang memilikinya.

Sedangkan menurut teori gadai adalah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar. Harta benda yang digadaikan itu dijadikan jaminan dan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Harta benda yang digadaikan adalah suatu amanah bagi orang yang berhutang atas orang yang memberikan hutang.⁵¹

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Munawar selaku Ketua Gapoktan Subur Makmur, beliau mengatakan bahwa :

kalau mau melakukan pinjaman di gapoktan harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman, setelah itu menyerahkan benda berharga atau sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman. Kami dari pihak pengurus memberi persyaratan harus ada jaminan untuk berjaga-jaga apabila nantinya terdapat kendala dalam pelunasan pinjaman. Kami tidak berani mengambil resiko untuk masalah tersebut. Wong namanya uang pinjaman, terlebih lagi ini uang bantuan dana hibah dari pemerintah. Jadi kami harus ekstra hati-hati dalam mengelolanya. Disini sistem pelaksanaan simpan pinjam ada yang musiman yaitu 4 bulan sekali ada juga yang bulanan.⁵²

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada benturan antara permasalahan yang telah dipaparkan dengan teori yang ada. Dimana masyarakat merasa keberatan dengan adanya jaminan pinjaman, sedangkan dari pihak pengurus sangat

⁵¹ Moh. Rifai, *Fiqih*, Wicaksana, Semarang, 2001, hlm. 21-22.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur dan Pengurus Program PUAP, Pada Tanggal 9 Agustus 2016.

mebutuhkan adanya jaminan dalam pinjaman. Hal ini dikarenakan dari pihak pengurus tidak ingin menanggung resiko terlalu besar apabila nantinya dalam pelaksanaan pinjaman terdapat pembiayaan yang bermasalah. Dalam pembiayaan, jaminan digunakan untuk menjaga kepercayaan antara pihak pertama selaku pemberi pinjaman dan pihak kedua selaku peminjam.

Untuk mengatasi masalah yang ada dari pihak anggota sendiri diharapkan dapat mengerti dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan, karena untuk pengelolaan dana dalam bentuk simpan pinjam dibutuhkan kehati-hatian, kesabaran, dan kejelian untuk memberikan pembiayaan kepada anggota agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan yang membebani pihak pengurus selaku pemberi pinjaman.

Sedangkan untuk pihak pengurus selaku pemberi pinjaman diharapkan dalam memberi pengarahan kepada anggota mengenai proses simpan pinjam lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat dapat memahami secara menyeluruh bagaimana prosedur pelaksanaan simpan pinjam yang sesungguhnya.

3. Analisis tentang Peran Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Agar Dapat Mengembangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Diantara tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Hal tersebut diharapkan nantinya masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik baik dari sebelumnya.

Oleh karena itu terdapat beberapa cara untuk membuat masyarakat agar dapat mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan, yaitu :

a. Melakukan Sosialisasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa untuk mengatasi masalah yang ada dilapangan dari pihak Penyuluh Pendamping mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terkait program pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

Sosialisasi itu sendiri adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, Penyuluh Pendamping dari Dinas Pertanian terjun langsung ke lapangan untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya masyarakat tani terkait program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), dimana masyarakat itu sendiri diberi arahan tentang apa itu PUAP, bagaimana pelaksanaan PUAP, dan manfaat apa yang diperoleh dengan adanya PUAP.

Dengan adanya sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif diharapkan masyarakat lebih antusias dalam pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

b. Melakukan Pendekatan

Setelah melakukan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pendekatan. Agar masyarakat dapat mengembangkan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dari pihak Penyuluh Pendamping maupun Pengurus melakukan metode pendekatan.

Sedangkan dalam teori dijelaskan pendekatan internal adalah penyusunan perencanaan strategi yang berpengaruh, seperti

kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, perekonomian dan kelembagaan. Pendekatan ini terkait dengan potenis yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri disuatu wilayah.⁵³

Dari upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar dapat mengembangkan program tersebut melalui metode pendekatan sudah tepat sasaran. Kesimpulannya metode pendekatan terutama pendekatan internal sangat bagus untuk diterapkan dalam pelaksanaan program PUAP ini. Hal ini karena untuk menyusun perencanaan srategi yang efektif harus diketahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat terkait potensi yang dimiliki.

c. Pemberian Motivasi

Selanjunya setelah melakukan pendekatan, strategi yang digunakan agar masyarakat dapat mengembangkan program PUAP yang dilakukan Penyuluh Pendamping maupun Pengurus adalah pemberian motivasi.

Dalam teori dijelaskan motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan tersebut jika berhasil tercapai, akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁵⁴

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya motivasi yang dapat mendorong masyarakat Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati agar dapat mengembangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

Kesimpulannya upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan program PUAP melalui pemberian motivasi sudah sesuai. Dengan adanya saran-saran atau

⁵³ Senen Machmud, *Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik dalam Peningkatan Sektor UMKM*, Jurnal Computech dan Bisnis, Volume. 7 , nomor 1, Juni 2013.

⁵⁴ Ashar Sunyoto Munandar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, UI, Jakarta, 2001, hlm.323.

masukan yang diberikan dapat membuat masyarakat menjadi tergerak untuk mau dan mampu dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu adanya komunikasi yang baik antar masyarakat maka penyampaian informasi dan penerimaan berita akan tepat sasaran, dan program pun akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

d. Pelatihan

Tahapan terakhir dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan program PUAP adalah pelatihan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa selain memberikan saran-saran atau masukan Penyuluh Pendamping juga mengadakan pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat tani di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pelatihan tersebut berupa cara penanaman padi yang baik dan sistem pengelolaannya. Hal ini diharapkan agar nantinya masyarakat tani dapat memperoleh hasil yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Dalam teori yang terkait dengan pelatihan dijelaskan bahwa pelatihan adalah bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atas keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang.⁵⁵

Hasil observasi yang telah dilakukan ada kaitannya dengan teori yang telah dipaparkan. Kesimpulannya pendidikan sangat diperlukan guna meningkatkan potensi masyarakat itu sendiri. Sehingga tujuan untuk menuju kehidupan yang lebih baik akan mudah untuk di realisasikan.

⁵⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.25.